

**EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM
PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN
MEDAN PERJUANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

NABILA ALYA
NPM: 1603100015

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NABILA ALYA BR BANGUN
NPM : 1603100015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2020
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH, MM (.....)
PENGUJI II : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.LKom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh

Nama : NABILA ALYA BR BANGUN
NPM : 1603100015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

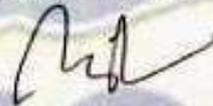
Medan, 16 Oktober 2020

PEMBIMBING



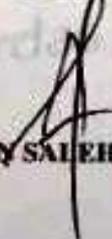
NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN



Dengan ini saya, NABILA ALYA BR.BANGUN, NPM 1603100015, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 18 September 2020

Yang Menyatakan



NABILA ALYA BR. BANGUN

NPM. 1603100015

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

OLEH :

NABILA ALYA BR. BANGUN

1603100015

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan kelurahan dalam kegiatan ketertiban umum belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi serta kerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat Kelurahan Pahlawan, belum mampu mengajak semua masyarakat Kelurahan Pahlawan untuk berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum. Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh belum kuatnya kelurahan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat serta memberikan sosialisasi akan pentingnya keberadaan pos keamanan. Dalam melakukan kerjasama, pihak kelurahan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum yang berjumlah 3 orang dan seluruh kepala lingkungan sebanyak 10 orang untuk mencapai ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Dalam proses kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga semua pihak yang ikut serta dalam kerjasama bisa mencapai hasil akhir dari diselenggarakannya kegiatan ketertiban umum.

Kata Kunci: Efektivitas, Koordinasi, Ketertiban umum.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun akhirat.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis Membuat Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN”**.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Teristimewa kepada Ayahanda penulis Afrizal Bangun dan Ibunda tercinta Siti Rafiah Sitepu S.E serta adik Soraya Alya yang telah banyak

memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
8. Bapak Tongku Panusunan Siregar,SH selaku Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

10. Kepada sahabat yang terbaik Mila Puspitasari dan Masitoh Lubis yang senantiasa menemani penulis dalam pengerjaan skripsi dan telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada BTS dan ARMY yang senantiasa memberi motivasi serta semangat kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
12. Kepada yang terkasih Taehyung.
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan , 16 Oktober 2020

Penulis



NABILA ALYA BR.BANGUN

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2. Pengertian Uraian Teoritis	8
2.1 Pengertian Efektivitas	8
2.1.1 Ukuran Efektivitas	10
2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas	11
2.2 Pengertian Koordinasi	13
2.2.1 Unsur – Unsur Koordinasi	15
2.2.2 Tipe-Tipe Koordinasi	16
2.2.3 Pendekatan untuk Melaksanakan Koordinasi Yang Efektif	17
2.2.4 Permasalahan Dalam Mencapai Koordinasi Yang Efektif	18
2.2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi	18
2.2.6 Prinsip – Prinsip Koordinasi	20
2.2.7 Tujuan Koordinasi	22
2.3 Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	22
2.3.1 Pengertian Pengelolaan	22

2.3.2 Fungsi-Fungsi Pengelolaan	24
2.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Metode penelitian	28
3.2 Kerangka Konsep	29
3.3 Definisi Konsep	30
3.4 Kategorisasi	31
3.5 Narasumber	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	36
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	36
3.9.1 Sejarah Ringkas Kelurahan Pahlawan	36
3.9.2 Gambaran umum seksi bidang ketentraman dan ketertiban umum	37
3.9.3 Visi dan Misi Kelurahan Pahlawan	38
3.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan	39
3.9.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pahlawan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	43
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara	45
4.2.1 Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum	45
4.2.2 Adanya keselarasan mengenai capaian atau tujuan dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum	48
4.2.3 Adanya komunikasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum	51
4.2.4 Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing – masing pihak yang turut serta dalam kegiatan ketertiban umum	52
4.3 Pembahasan	54
4.3.1 Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan ketertiban umum	55

4.3.2 Adanya Keselarasan mengenai capaian dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum	57
4.3.3 Adanya komunikasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum	59
4.3.4 Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak yang turut serta dalam kegiatan ketertiban umum	62
BAB V PENUTUP	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran	67
Daftar Pustaka	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur

Tabel 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Struktur organisasi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Medan No 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu serta melaksanakan sebagian tugas camat, di tingkat kelurahan dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan serta bertanggung jawab langsung kepada camat.

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan di bidang penyelenggaraan pemerintah kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 pasal 3 ayat 1, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, untuk itu lurah harus selalu berkoordinasi dengan sekretaris dalam menyusun rencana dan program pembinaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam suatu kegiatan pemerintahan kelurahan, karena tanpa adanya koordinasi yang baik

maka pelaksanaan tugas – tugas di kelurahan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan “Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah (Perda) berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP), dipimpin oleh lurah yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota”.

Dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal pemeliharaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, lurah dibantu oleh seksi ketentraman dan ketertiban umum (KASI TRANTIB) dan kepala lingkungan sebagai unit kelurahan yang bertugas sebagai pengelola kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kelurahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2018.

Dalam rangka pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum perlu adanya koordinasi kelurahan serta pembinaan seksi ketentraman dan ketertiban umum dan kepala lingkungan yang dilakukan secara intensif agar unit kelurahan ini dapat melaksanakan tugas serta fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Koordinasi diperlukan dalam setiap unit kerja utamanya birokrasi pemerintah karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang baik diharapkan semua unit kelurahan dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan kerja yang sama dalam melaksanakan fungsinya.

Koordinasi merupakan salah satu tugas lurah yang mesti dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unit kelurahan, dalam hal pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban umum ini lurah perlu berkoordinasi dengan kepala seksi ketertiban ketentraman umum dan kepala lingkungan. Koordinasi yang dilakukan oleh kelurahan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas lembaga-lembaga yang menjadi unit kelurahan sehingga kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan efektif. Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai unit kelurahan dalam hal ini bertugas melaksanakan kegiatan penyediaan pos keamanan kelurahan serta pengadaan dan penguatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban kelurahan dilingkungan masyarakat Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.

Kelurahan Pahlawan merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan memiliki 1.855 KK yang terdiri atas 15 (lima belas) lingkungan. Tetapi hanya memiliki 3 pos keamanan yang aktif berjalan hingga sekarang yang di setiap pos keamanan disediakan 5 tenaga keamanan, yang di tempatkan di lingkungan yang dianggap rawan kejahatan oleh masyarakat setempat yakni lingkungan 8 , lingkungan 9 dan lingkungan 13. Dari 15 lingkungan yang terdapat di Kelurahan Pahlawan idealnya memiliki 10 pos keamanan guna menjaga keamanan lingkungan perumahan masyarakat Kelurahan Pahlawan Kota Medan, mengurangi tingkat kriminalitas, mempererat tali silaturahmi antar warga, pembinaan moral dan membangun disiplin warga.

Kendala yang dimiliki seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan adalah pengadaan tenaga keamanan serta kurangnya partisipasi

masyarakat dalam hal iuran yang ditetapkan untuk berjaga malam. Dalam hal rekrutmen tenaga keamanan dilakukan melalui musrembangkel (musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan) yang dilakukan oleh kelurahan serta seksi ketentraman dan ketertiban umum dan kepala lingkungan (Kepling), tenaga keamanan yang di rekrutmen berasal dari masyarakat setempat yang dianggap kompeten dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dibebankan biaya keamanan sebesar Rp.25.000/KK bagi rumah tinggal tanpa usaha tambahan dan Rp.50.000 – 100.000/KK bagi rumah dengan usaha tambahan seperti usaha jual beli besi yang putusnya diberitahukan kepada masyarakat kelurahan pahlawan melalui surat edaran yang dibagikan oleh tiap kepala lingkungan (Kepling). Namun hal ini tidak berjalan sesuai rencana yang mana dari 1.855 KK hanya 422 KK atau sekitar 5,52% KK yang ikut berpartisipasi dalam pemungutan uang keamanan kelurahan. Sehingga dana yang terkumpul untuk pembiayaan keamanan itu sangat minim, selain dana yang minim, maka upaya untuk penambahan pos keamanan dan tenaga keamanan menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum di Kelurahan Pahlawan.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal keamanan masih rendah yang dibuktikan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan biaya keamanan kelurahan. Dalam mengatasi masalah ini perlu adanya koordinasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan untuk menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan di Kelurahan Pahlawan, sehingga dapat

mendorong efektivitas kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sangat diperlukan keselarasan, kesepakatan antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: bagaimana efektivitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan pahlawan kecamatan medanperjuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui efektivitas koordinasi kelurahan dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam ilmu sosial dan politik
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak Kelurahan Pahlawan Medan Perjuangan dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain: efektivitas koordinasi Kelurahan, meningkatkan kinerja Lembaga Pemberdayaan Kelurahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2. Pengertian Uraian Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan teori digunakan untuk menjelaskan fenomena social yang menjadi objek peneliti. Menurut Nawawi (1992:46) menyatakan bahwa uraian teoritis selalu didefinisikan sebagai landasan berfikir dari sudut mana masalah yang diteliti dan disorot.

Teori pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau didasarkan pada objek yang diteliti, maka kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut.

2.1 Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang “memuaskan”. Jadi, efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dengan demikian, pengertian efektivitas dalam definisi diatas menunjukkan pada kualifikasi sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu

konsep yang menggambarkan tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan pemakaian proses yaitu pemilihan cara-cara yang sesuai dengan tujuan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Gie (2000 : 24) mengungkapkan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Nasucha dalam Irham Fahmi (2001:3) juga mengemukakan bahwa sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Menurut Gibson (2002:28) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan. Gibson (2002:62) menyimpulkan kriteria efektivitas dibagi menjadi 3 (tiga) indikator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu :

- 1) Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi, efisiensi, dan kepuasan.
- 2) Efektivitas jangka menengah, meliputi kemampuan menyesuaikan diri dan mengembangkan diri.
- 3) Efektivitas jangka panjang meliputi keberlangsungan atau hidup terus.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Secara umum efektivitas organisasi merupakan konsep untuk menggambarkan mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard M. Steers yang meliputi :

- 1) Kemampuan Menyesuaikan Diri manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan;

- 2) Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu;
- 3) Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi;
- 4) Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu.

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu:

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam produksi.

2) Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi. Yang meliputi macam-macam

atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektivitas khususnya atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas khususnya atribut diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi 3) Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

4) Kebijakan dan Praktek Manajemen

Karena pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita ke arah tujuan yang diinginkan. Kebijakan harus dipahami tidak berarti bahwa kebijakan harus ditulis. Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan kemudian melaksanakannya melalui orang-orang. Definisi ini menekankan bahwa dalam organisasi merupakan sumber daya terpenting.

2.2 Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *codan ordinare* yang berarti *toregulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, menurut Ndraha (2003:290) koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291), Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Koordinasi menurut Dr.Awaluddin Djamin (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Koordinasi dan

hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien).

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dan pekerjaan – pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 88) mengatakan koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Atau dengan kata lain, Koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan yang lain.

kesimpangan siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.2.1 Unsur – Unsur Koordinasi

Unsur-unsur koordinasimenurut Terry (2006:126):

- 1) Unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*)

Menurut Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja:

- a) Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*)

Pengaturan waktu menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan terpimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.

- b) Harmonis (*harmonius*)

Menurut Glenn Griswold dalam Kustadi Suhandang (2004:45-46) pengertian harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang.

- c) Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*)

Menurut G.R. Terry dalam Malayu S.P. Hasibuan (2011:17) tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang atasan.

2.2.2 Tipe-Tipe Koordinasi

Koordinasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan berbagai aktivitas/pekerjaan yang telah dibagi-bagi di masing-masing unit kerja dapat terarah secara efektif, sehingga tujuan atau sasaran organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu:

- 1) Koordinasi vertikal adalah upaya penatuan atau pepaduan oleh seorang pemimpin terhadap kegiatan berbagai unit organisasi yang ada di bawah kekuasaannya guna mendukung tercapainya tujuan organisasi;
- 2) Koordinasi Horizontal adalah upaya penyatuan atau pepaduan oleh seorang pemimpin terhadap kegiatan berbagai unit organisasi yang berada pada tingkat organisasi (posisi/jabatan) yang setingkat atau sejajar.

Dalam hal ini, koordinasi yang dilakukan kelurahan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan merupakan tipe koordinasi vertikal yang mana lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan merupakan mitra kerja yang berada di bawah wewenang kelurahan.

2.2.3 Pendekatan untuk Melaksanakan Koordinasi Yang Efektif

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Ada tiga pendekatan dasar untuk melaksanakan koordinasi yang efektif, yaitu:

1) Teknik Manajemen Dasar

Permasalahan-permasalahan organisasi melalui tuntutan koordinasi, dapat mengulangi dengan menggunakan mekanisme manajerial dasar, yaitu:

- a) Hirarki manajerial, Artinya, rantai komando organisasi menyatakan hubungan di antara para anggota dan unit-unit yang diawasi, sehingga mempermudah aliran informasi dan kerja di antara unit-unit yang ada.
- b) Aturan dan Prosedur, Artinya, aturan dan prosedur merupakan kebijakan yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin yang mungkin akan timbul.
- c) Rencana dan tujuan. Artinya, penetapan rencana dan tujuan dapat menjadi peralatan pengkoordinasian dengan mengarahkan semua unit organisasi terhadap target-target yang sama.

2) Meningkatkan Koordinasi Potensial

Bila setiap unit organisasi semakin saling ketergantungan, semakin besar ukurannya, serta fungsinya semakin luas, maka dibutuhkan banyak informasi bagi organisasi untuk mencapai sasaran-sasarannya, sehingga perlu ditingkatkan potensi untuk melakukan koordinasi;

3) Pengurangan Kebutuhan akan Koordinasi

Hal ini diperlukan sebagai solusi atas ketidakefektifan dari pendekatan dasar yang telah dibahas sebelumnya, yaitu teknik manajemen dasar, serta peningkatan potensi koordinasi, yang sebagai akibat dari tuntutan koordinasi begitu besar, sehingga dimungkinkan dapat dilakukan melalui pendekatan pengurangan kebutuhan koordinasi yang ketat.

2.2.4 Permasalahan Dalam Mencapai Koordinasi Yang Efektif

Peningkatan spesialisasi menyebabkan tingginya kebutuhan akan koordinasi. namun semakin besar kadar spesialisasi, maka semakin sulit bagi pemimpin dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari unit-unit yang berbeda. Stoner dalam Tambunan (2015) mengidentifikasi empat jenis perbedaan sikap dan gaya kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu: a)Perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu;

b) Perbedaan orientasi waktu;

c) Perbedaan orientasi antar pribadi;

d) Perbedaan formalitas struktur.

2.2.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

1) Satuan tindakan

Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

2) Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang waktu yang ditentukan oleh adanya komunikasi. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

3) Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

4) Disiplin

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

2.2.6 Prinsip – Prinsip Koordinasi

Dydiet Hardjito (1997:55) berpendapat bahwa prinsip koordinasi merupakan acuan atau dasar yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan koordinasi. Penerapan prinsip koordinasi secara tepat dapat mendukung tercapainya koordinasi yang efektif. Prinsip-prinsip koordinasi ada tiga, yakni:

1) Prinsip Kesatuan Komando

Dalam prinsip kesatuan komando pegawai harus mempunyai satu pemimpin saja. Setiap pegawai harus tahu kepada siapa ia harus melapor, dan siapa pemimpinnya. Hal ini sangat penting untuk memperkecil kebingungan siapa yang harus membuat keputusan dan siapa yang harus melakukannya/mengerjakannya.

2) Prinsip Tangga

Prinsip tangga menunjukkan lebih jelas dan menandakan adanya rantai komando yang tidak terputus antara anggota organisasi dengan atasan langsungnya. Tugas-tugas yang diberikan jelas dan tidak tumpang tindih.

3) Prinsip Rentang Kendali

Prinsip rentang kendali memberikan gambaran berapa banyak bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang pimpinan. Prinsip rentang kendali ini berkeyakinan keras bahwa tidak mungkin seorang pimpinan dapat mengawasi bawahan dalam jumlah besar.

Selanjutnya Sugandha, mengemukakan prinsip-prinsip koordinasi ialah:

- a) Adanya kesatuan mengenai sasaran dan tujuan yang harus dicapai;

- b) Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak;
- c) Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang ditetapkan;
- d) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing;
- e) Adanya koordinasi dalam melaksanakan dan mengawasi seluruh kerjasama dalam organisasi dan memahami setiap masalah dan menyelesaikan permasalahan tersebut;
- f) Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada coordinator dapat memonitori seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak;
- g) Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Dari pemaparan tentang prinsip-prinsip koordinasi di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang dimaksud dalam prinsip-prinsip koordinasi adalah suatu prinsip yang mengedepankan suatu hubungan kerja sama yang baik, perencanaan yang baik, serta tujuan yang sama dalam merencanakan program.

2.2.7 Tujuan Koordinasi

Menurut Ndraha (2011), tujuan koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan inter-dependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif antisipatif dikalangan unit kerja inter-dependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

2.3 Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.3.1 Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Mary Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

- a) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Drs.M.Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu

diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.3.2 Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk

mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang 1. Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu *what, way, where, when, who* dan *how*. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
- b) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
- c) Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan ?
- d) Kapankah tindakan itu dilaksanakan ?
- e) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- f) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?

2. Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

- a) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- b) Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- c) Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.

- d) Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin kordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

2.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

Menurut Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2018 seksi ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah melalui sekretaris. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pasal 5 huruf (e) menyebutkan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat yang mana mempunyai tugas meliputi : 1) Pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban Kelurahan.

Selain itu kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan mempunyai fungsi sebagai :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Pembinaan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum kelurahan;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kerjanya;
- e) Membuat laporan hasil pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

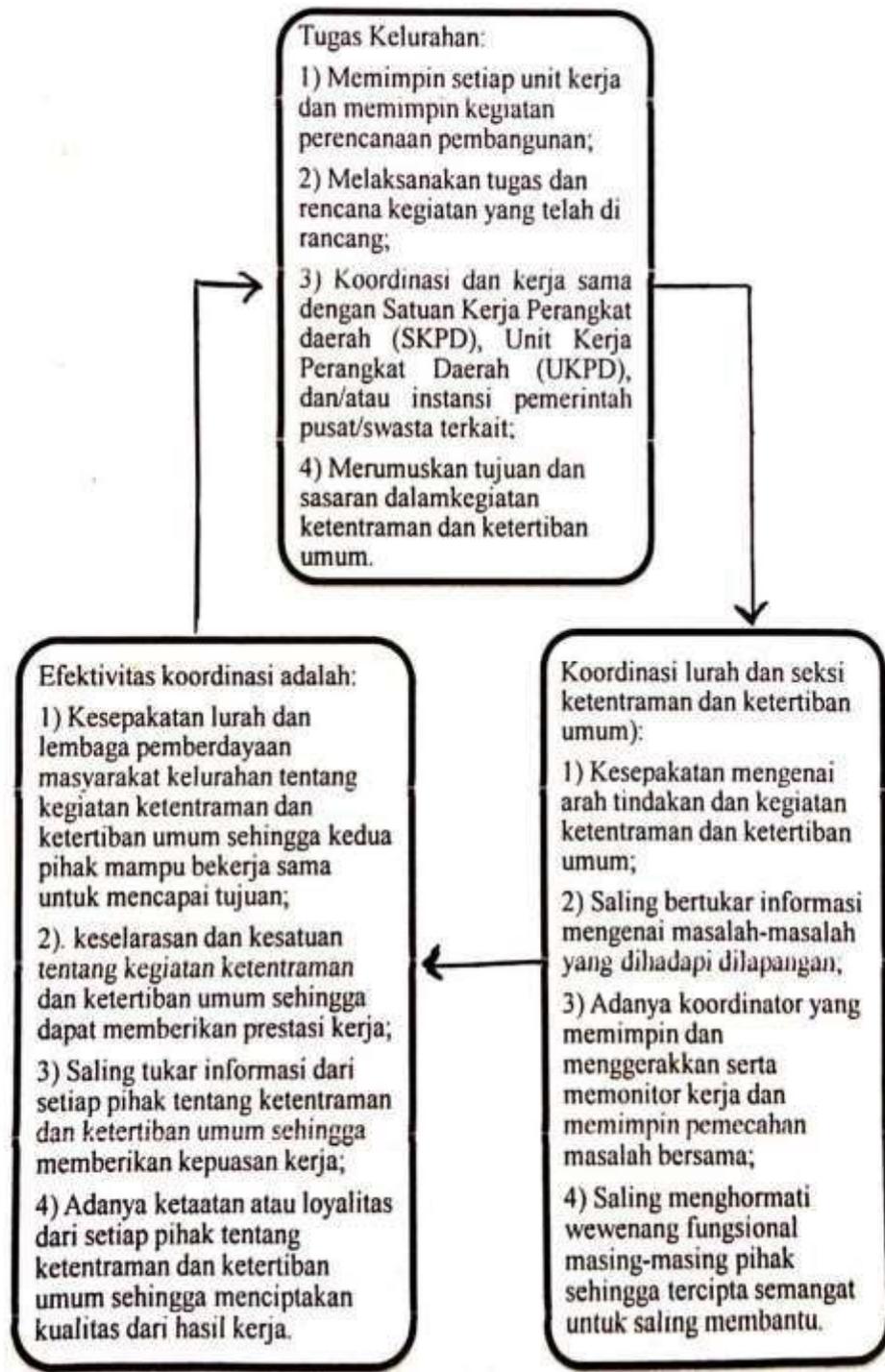
3.1 Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif dan dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai efektivitas koordinasi Kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan.

Menurut Nazir (2011:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Moleong (2016:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lai secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dalam bentuk kata atau bahasa dalam meneliti sekelompok manusia atau objek untuk memahami fenomena yang terjadi.

3.2 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai suatu ciri yang sama. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- 1) efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana apa yang direncanakan dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif kegiatan tersebut.
- 2) koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan yang lain.
- 3) pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.
- 4) Seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat yang mana seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas meliputi : 1) Pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban Kelurahan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi kategori dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum.
- b) Adanya keselarasan mengenai capaian dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum.
- c) Adanya komunikasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum .
- d) Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing – masing pihak yang turut serta dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data – data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber untuk memberikan tanggapan dan pemahaman mengenai efektivitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, narasumber dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang, antara lain :

- 1) Empat orang dari pihak Kelurahan Pahlawan

a. Narasumber 1

Nama : Tongku Panusunan Siregar, SH

Usia :45 Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan / Jabatan : Lurah

Pendidikan Terakhir : S1

b. Narasumber 2

Nama :Devi Afrianti, SE

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan / Jabatan : Sekretaris Kelurahan Pahlawan

Pendidikan Terakhir : S1

c. Narasumber 3

Nama :Arfansyah Putra, ST

Usia : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Pahlawan

Pendidikan Terakhir : S1

d. Narasumber 4

Nama : Lukertina Sianturi,SH

Usia : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum

2) Satu orang dari pihak masyarakat

e. Narasumber 5

Nama : Amrizal

Usia : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan / Jabatan : Masyarakat Kelurahan Pahlawan

Pendidikan Terakhir : SLTA / SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Data Primer

Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan – satuan yang kemudian dikategorikan

pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

b. Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. Waktu dilakukannya penelitian ini pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 di Kantor Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Ringkas Kelurahan Pahlawan

Kelurahan Pahlawan merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman, dan lain-lain. Kelurahan Pahlawan terdiri dari 17 (Tujuh Belas) Lingkungan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah :

- a. Sebelah Utara : Jl. H.M Yamin SH
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pandau Hulu
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Sei Kera Hulu
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Sidorame Timur

Adapun peta penduduk dalam lingkup kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Pahlawan :

- a. Jumlah Penduduk : 7.697 Jiwa
- b. Jumlah Penduduk Dewasa : 5.674 Jiwa
- c. Jumlah Laki – Laki : 3.692 Jiwa
- d. Jumlah Perempuan : 4.005 Jiwa
- e. Jumlah KK : 1855 KK
- f. Jumlah KK Miskin : 422 KK atau sekitar 5,52 %
- g. Jumlah Penduduk Miskin : 1688 Jiwa

3.9.2 Gambaran umum seksi bidang ketentraman dan ketertiban umum

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kelurahan mempunyai tugas melakukan pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban Kelurahan, perencanaan program kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Pembinaan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum kelurahan;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kerjanya;
- e) Membuat laporan hasil pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. Seksi ketentraman dan ketertiban umum merupakan unsur yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada lurah melalui sekretaris kelurahan. Pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum berkoordinasi dengan lurah serta setiap kepala lingkungan di Kelurahan Pahlawan.

3.9.3 Visi dan Misi Kelurahan Pahlawan

a) Visi

Dalam perencanaan pembangunan kelurahan, rumusan visi sangat penting karena menjadi pedoman implementasi pembangunan. Secara konseptual, visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu daerah harus dibawa agar konsisten dan tetap antisipatif, inovatif, dan realistis. Visi yang baik (*vision success*) merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan sebuah daerah, visi di samping sebagai sumber inspirasi

dan sumber motivasi juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan suatu daerah ke masa depan.

Visi Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan yaitu menjadikan kelurahan perjuangan berkualitas, akuntabel dalam pelayanan publik menuju masyarakat sejahtera.

b) Misi

Misi merupakan suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi menjadi landasan penting suatu organisasi dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi serta menjadi sarana bagi organisasi dalam mengidentifikasi tujuan organisasi. Misi Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan sendiri ialah :

- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
- Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kelurahan

3.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) merupakan sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Kelurahan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Kelurahan

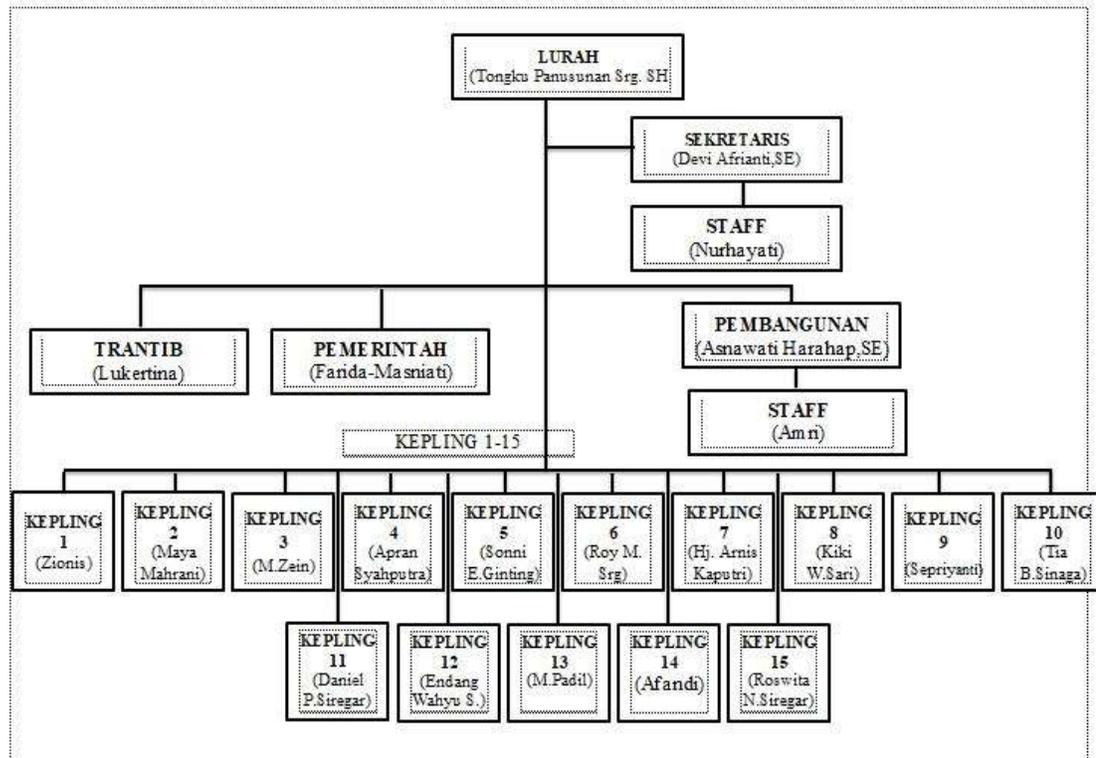
Kelurahan dipimpin oleh Lurah, selaku perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, lurah sebagai penyelenggara fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

3.9.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pahlawan

Gambar 3.2



Sumber : Hasil Penelitian, 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini berfokus pada efektivitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketertiban dan ketentraman umum. Penulis menentukan bahwa yang menjadi narasumber berjumlah 5 (lima) orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Wawancara dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data – data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data – data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber Aparatur Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan dan masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini

disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki – Laki	3	60 %
2	Perempuan	2	40 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi laki-laki 60 % dan perempuan 40 %.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 - 39 tahun, umur 40 – 49 tahun dan umur 50 – 59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing – masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30–39	1	20 %
2	40–49	3	60 %
3	50–59	1	20 %
	Jumlah	5	100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berusia mulai dari 50-59 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan usia 30-39 tahun sebanyak 1 orang atau 20% serta usia 40-49 tahun sebanyak 3 orang atau 60%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Narasumber yang telah diwawancara di kategorikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat sarjana dan tingkat pascasarjana. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut :

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana	4	80 %
2	SMA	1	10 %
Jumlah			100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang berbeda antara tingkat Sarjana dengan persentase 80%. dan SMA 10%.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1 Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum

Kerja sama sangat penting dalam membangun hubungan harmonis antara pimpinan dengan pegawai yang memegang peranan strategis bagi organisasi, terutama dalam kegiatan operasional, organisasi membutuhkan kerja sama yang saling

mendukung dan mempengaruhi di antara berbagai elemen yang ada dalam organisasi. Kerja sama merupakan suatu bentuk perwujudan daripada hubungan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar,SH selaku Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan mengatakan dalam melakukan kerja sama melibatkan kepala lingkungan serta seksi ketentraman dan ketertiban umum tentang kegiatan pengadaan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan di setiap lingkungan Kelurahan Pahlawan.

Dalam melakukan kerja sama lurah menyelenggarakan rapat yang diikuti oleh setiap kepala lingkungan, seksi ketentraman dan ketertiban umum serta sekretaris kelurahan untuk membahas tentang proses serta tujuan dari kegiatan ketertiban umum di setiap lingkungan kelurahan. Pengadaan pos keamanan diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing – masing serta terwujudnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Senada dengan itu, Ibu Devi Afrianti, SE selaku sekretaris Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, mengatakan dalam menciptakan kesatuan dan kesepahaman dengan pihak yang terkait dan juga masyarakat kelurahan melakukan musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa. Kelurahan

selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh kelurahan agar setiap masyarakat dapat mengetahui setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan kelurahan untuk masyarakat.

Selain itu, Ibu Lukertina Sianturi,SH selaku kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan Pahlawan mengatakan dalam proses musrembang yang dilakukan bersama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan terwujudnya ketertiban umum di kelurahan pahlawan belum berjalan efektif dikarenakan masyarakat lebih memilih tidak ikut serta dalam kegiatan musrembang yang dilakukan kelurahan.

Hal serupa juga disampaikan Bapak Arfansyah Putra, ST selaku Kepala Lingkungan IV Kelurahan Pahlawan mengatakan partisipasi masyarakat sangat kurang untuk ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum ini bisa dilihat dari masyarakat yang enggan untuk ikut serta dalam kegiatan musrembang dengan kelurahan yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat kelurahan pahlawan serta masyarakat juga enggan untuk membayar uang keamanan sehingga menyebabkan tenaga keamanan yang merupakan masyarakat sekitar pun enggan untuk berjaga dan akhirnya pos keamanan yang telah disediakan pun jadi terabaikan.

Menurut Bapak Amrizal selaku masyarakat Kelurahan Pahlawan beliau mengatakan bahwa musrembang yang dilakukan kelurahan dengan masyarakat kelurahan pahlawan untuk kegiatan ketertiban umum ini belum berjalan baik, dilihat dari setiap musrembang yang dilakukan bertujuan menjalin kerjasama dengan masyarakat ini sangat sedikit masyarakat ikut serta.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan kelurahan belum berjalan dengan baik karena kurangnya motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum.

4.2.2 Adanya keselarasan mengenai capaian atau tujuan dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum

Keselarasan merupakan kondisi saat tujuan anggota organisasi selaras atau sejalan dengan tujuan organisasi itu sendiri sehingga dapat membantu pencapaian tujuan masing –masing. Dalam suatu organisasi, perilaku manusia dan tingkat pencapaian keselarasan tujuan di pengaruhi oleh sistem formal meliputi perencanaan strategis, penyusunan kegiatan dan tujuan. Lalu sistem informal meliputi etos kerja, gaya manajemen, dan budaya organisasi. Keselarasan tujuan atau *Goal Congruence* diterapkan oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan ditetapkan dalam mendukung tujuan organisasi, hal ini berarti bahwa organisasi akan meninjau semua kegiatan untuk memastikan bahwa tidak satupun dari unit organisasi bekerja dengan cara yang menghambat kemampuan oragnisasi untuk mencapai tujuannya apapun bentuknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arfansyah Putra, ST selaku Kepala Lingkungan IV (Empat) Kelurahan Pahlawan, mengatakan hambatan yang dialami lurah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan ialah masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan,

Kelurahan Pahlawan telah merealisasikan dana kelurahan melalui pengadaan sarana untuk keperluan pos keamanan seperti : pentungan, senter, lampu emergensi dan jaket hujan. Pengadaan pos keamanan ini kurang di dukung oleh masyarakat sebab masyarakat berpikir mereka tidak memerlukan tenaga keamanan serta pos keamanan dikarenakan masyarakat dapat menjaga rumah mereka sendiri. Namun hal tersebut bertentangan dengan masyarakat yang lingkungan tempat mereka tinggal sekaligus berwirausaha jual beli besi dan kayu dimana mereka sangat membutuhkan pos keamanan dan tenaga keamanan untuk berkeliling mengawasi lingkungan tempat mereka tinggal.

Senada dengan itu, Ibu Lukertina Sianturi,SH selaku seksi ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan Pahlawan mengatakan dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, lurah selalu turut serta dalam mengawasi setiap proses setiap kegiatan pengadaan pos keamanan di kelurahan pahlawan, dimulai dari proses perencanaan hingga musyawarah yang dilakukan untuk membahas pembangunan pos keamanan, penyediaan tenaga keamanan, penyediaan sarana keperluan tenaga keamanan.

Menurut Ibu Devi Afrianti, SE selaku sekertaris Kelurahan Pahlawan mengatakan kegiatan pengadaan pos keamanan dan pengadaan tenaga keamanan ini belum sepenuhnya efektif dikarenakan adanya beberapa kontra yang terjadi di masyarakat, namun untuk pos pengamanan telah di sediakan oleh kelurahan guna mendukung kegiatan ketertiban umum ini. Selain itu lurah melakukan musyawarah yang dilakukan di kelurahan untuk menentukan berapa uang keamanan yang akan di

pungut kepada masyarakat serta penunjukan tenaga keamanan yang akan bertugas di setiap lingkungan Kelurahan Pahlawan. Musyawarah ini tidak hanya melibatkan masyarakat saja namun kepala lingkungan juga turut serta ikut dalam kegiatan musyawarah ini, di dalam kegiatan musyawarah ini lurah serta kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum juga menampung setiap saran dan keluhan masyarakat mengenai ketentraman dan ketertiban umum.

Hal lain juga disampaikan Bapak Tongku Panusunan Siregar,SH selaku Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan bahwa belum tercapainya sasaran dari kegiatan ketertiban umum dikarenakan sulitnya untuk memotivasi masyarakat akan pentingnya ketertiban dan ketentraman umum di lingkungan keluarahan.

Bapak Amrizal selaku masyarakat kelurahan pahlawan mengatakan, bahwa kegiatan ketertiban umum ini dirasa cukup memberatkan masyarakat dengan uang keamanan yang dibebankan kepada masyarakat itu yang menyebabkan kegiatan tertiban umum ini tidak berjalan dengan efektif.

Dapat disimpulkan bahwa keselarasan dari capaian kegiatan ketertiban umum di kelurahan pahlawan belum bisa berjalan dengan semestinya karena kelurahan belum sepenuhnya bersosialisasi dengan masyarakat tentang pemungutan uang keamanan.

4.2.3 Adanya komunikasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum

Komunikasi merupakan nafas dari keberlangsungan sebuah organisasi. Suatu organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Komunikasi organisasi sendiri merupakan suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lainnya dalam konteks organisasi. Dalam suatu organisasi didalamnya terdiri dari orang – orang yang memiliki tugas masing – masing serta saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem tentu memerlukan komunikasi yang baik agar kinerja organisasi berjalan dengan baik pula, sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar, SH selaku Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan mengatakan, dalam menciptakan komunikasi yang efektif dengan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan dengan cara sering bertukar pikiran mengenai apa yang menjadi kritikan masyarakat, dikarenakan lurah tidak dapat setiap saat memonitoring apa yang terjadi di masyarakat maka kepala lingkungan yang bertugas menyampaikan saran dan kritik yang ada di setiap lingkungan kelurahan dapat menyampaikannya dengan lurah untuk di bahas bersama untuk menanggulangi apa yang menjadi kritikan masyarakat. Lurah juga melakukan diskusi dengan perangkat kelurahan lainnya mengenai setiap kegiatan yang direncanakan dengan duduk bersama.

Ibu Lukertina Sianturi, SH selaku seksi ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan Pahlawan juga mengatakan, dalam komunikasi yang terjalin dengan setiap

perangkat kelurahan juga tidak dapat terhindar dari konflik seperti perbedaan pendapat dalam membahas kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya konflik lurah selalu melakukan diskusi untuk menentukan kesepakatan atau tindakan apa yang akan dilakukan.

Senada dengan itu, Ibu Devi Afrianti, SE selaku Sekretaris Kelurahan Pahlawan menyampaikan dalam proses penyampaian informasi bapak lurah menggunakan rapat dan musrembang sebagai wadah untuk membahas setiap kegiatan kelurahan, dalam rapat ini juga perangkat kelurahan serta masyarakat kelurahan di berikan kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya untuk kemajuan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.

Bapak Arfansyah Putra, ST selaku Kepala Lingkungan IV (Empat) Kelurahan Pahlawan menambahkan bahwa komunikasi berupa rapat yang dilakukan kelurahan kepada setiap kepala lingkungan mengenai kegiatan ketertiban umum dalam hal penyediaan pos keamanan mendapat hambatan yang mana lurah kurang berkoordinasi dengan kepala lingkungan menyebabkan kurangnya informasi yang disampaikan kembali dari kepala lingkungan kepada masyarakat mengenai kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan.

4.2.4 Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing – masing pihak yang turut serta dalam kegiatan ketertiban umum

Sikap menghormati seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam sebuah organisasi merupakan sikap patuh dan hormat terhadap seorang yang mempunyai

kekuasaan di suatu organisasi. Patuh dan hormat terhadap seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam organisasi sangat perlu diterapkan. Sikap menghormati akan terwujud apabila organ organisasi dapat hormat terhadap wewenang setiap organ di organisasi dengan tidak mengganggu apa yang bukan menjadi wewenang kerjanya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Devi Afrianti, SE selaku sekretaris Kelurahan Pahlawan mengatakan, setiap rapat yang diselenggarakan kelurahan untuk membahas kegiatan serta perencanaan pembangunan kelurahan. Lurah sebagai pemimpin rapat selalu mementingkan kepentingan masyarakat untuk memajukan masyarakat di kelurahan pahlawan. Dalam melakukan rapat, masing – masing perangkat kelurahan saling menghargai wewenang masing-masing dengan tidak melewati apa yang tidak menjadi wewenangnya. Seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan bekerja sama untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungan kelurahan pahlawan dengan cara menyediakan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan untuk menjaga lingkungan kelurahan. Lurah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kelurahan mempunyai peranan sebagai seorang yang mengarahkan serta memberikan pembagian kerja kepada setiap unit perangkat kelurahan.

Menurut Ibu Lukertina Sianturi, SH selaku seksi ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan Pahlawan mengatakan, dalam pengambilan keputusan untuk mencapai ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan dilakukan melalui diskusi yang

dilakukan lurah dengan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan kelurahan pahlawan. Melalui diskusi ini seksi ketentraman dan ketertiban umum membahas lingkungan mana saja yang menjadi titik fokus untuk pengadaan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan. Dikarenakan lingkungan kelurahan pahlawan juga berkembang sebagai daerah jasa perdagangan jual beli besi dan kayu maka dari itu kegiatan pengadaan pos keamanan serta tenaga keamanan ini sangat di perlukan untuk meminimalisir tindakan melanggar hukum.

Bapak Amrizal selaku masyarakat Kelurahan Pahlawan yang juga merupakan salah satu pemilik usaha di lingkungan kelurahan pahlawan mengatakan, kegiatan pengadaan pos keamanan serta pengadaan tenaga keamanan ini sangat di perlukan dan membantu masyarakat Kelurahan Pahlawan sebab dengan adanya kegiatan ini masyarakat menjadi merasa lebih aman apalagi bagi masyarakat yang berwirausaha besi dan kayu. Bapak Amrizal sendiri mengaku tidak keberatan dengan kegiatan ketertiban umum tersebut. Masyarakat juga telah ikut serta dalam musyawarah yang dilakukan kelurahan untuk membahas kegiatan ketertiban umum tersebut. Bapak Tongku Panusunan Siregar,SH juga melakukan diskusi bersama setiap kepala keluarga di lingkungan Kelurahan Pahlawan guna memotivasi masyarakat setempat untuk bersedia bersama – sama menjaga lingkungan kelurahan pahlawan.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data diatas, maka dalam pembahasan sub bab ini terdapat kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan narasumber di

Kantor Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu. Berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan :

4.3.1 Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan ketertiban umum

Kerja sama sangat penting dalam hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan pegawai yang memegang peranan strategis bagi organisasi, terutama dalam kegiatan operasional organisasi membutuhkan kerja sama yang saling mendukung dan mempengaruhi di antara berbagai elemen yang ada dalam organisasi. Kerja sama merupakan suatu bentuk perwujudan daripada hubungan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha mencapai tujuan bersama.

Kerja sama adalah proses untuk melakukan untuk melakukan sesuatu yang mencakup beberapa hal serta unsur – unsur tertentu antara lain :

- a) Adanya tujuan yang sudah ditetapkan bersama atau tujuan sesuai dengan peraturan;
- b) Adanya pembagian tugas yang jelas;
- c) Dalam bekerja sama saling tolong menolong antara satu pihak dengan pihak lainnya;
- d) Adanya koordinasi yang baik.

Dapat penulis simpulkan bahwa kerja sama akan berjalan efektif apabila atasan dapat berkerja sama dengan bawahannya hingga dapat tercapainya tujuan bersama.

Kerjasama yang efektif dapat dilihat dari cara pemimpin menjalankan tugasnya sehingga terlihat koordinasi antara pemimpin dan bawahan, kerja sama akan efektif apabila dilakukan atau dijalankan dengan masyarakat juga, bukan hanya dengan perangkat kelurahan/bawahan. Kerjasama dengan bawahan yang dimaksud adalah kelurahan dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan cenderung melibatkan bawahan, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kegiatan kerja guna mencapai ketertiban umum di kelurahan.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan dengan perangkat kelurahan belum maksimal, karena kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan hanya melibatkan dan menunjuk kepala lingkungan serta seksi ketentraman dan ketertiban umum, lurah tidak turun langsung ke lapangan untuk melihat apa yang menjadi kendala dalam kegiatan ketertiban umum ini sedangkan lurah bertugas sebagai pemelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Juli 2020 dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar,SH bahwa kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan hanya dengan perangkat kelurahan tidak dengan masyarakat. Kerjasama tersebut terhalang oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat sehingga kelurahan sulit untuk melakukan interaksi langsung. Dengan hal itu, kerjasama yang dilakukan Kelurahan Pahlawan hanya melibatkan perangkat kelurahan guna untuk tercapainya tujuan dengan di adakannya kerjasama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bekerjasama/terlibat langsung secara bersama-sama dalam menjalankan tugas demi pencapaian tujuan.

Menurut Soerjono Soekanto (2006 : 66) kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

Ratminto dkk (2005 : 129) juga menegaskan bahwa kerja sama adalah komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, ini berarti setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri. Kerja sama merupakan bagian dari organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta.

4.3.2 Adanya Keselarasan mengenai capaian dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum

Keselarasn atau kesatuan mengenai capaian dari tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi. Istilah keselarasn tujuan diterapkan pada sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan ditetapkan dalam mendukung tujuan organisasi. Ini berarti bahwa organisasi akan meninjau semua operasi dan kegiatan untuk memastikan bahwa tidak satupun dari organ organisasi bekerja dengan cara yang membatasi atau menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya apa pun bentuknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan bahwa, dalam meyelaraskan tujuan kegiatan ketertiban umum, pihak kelurahan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan melakukan rapat serta musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dengan mengikutsertakan masyarakat, yang diselenggarakan seminggu 2 kali yaitu di hari rabu yang bertempat di balai kantor kelurahan dan di hari minggu dilakukan di setiap lingkungan bersama masyarakat Kelurahan Pahlawan. Dalam proses rapat serta musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang dilakukan Kelurahan Pahlawan, pihak kelurahan mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga semua pihak yang ikut serta dalam rapat mengenai kegiatan ketertiban umum bisa mencapai hasil akhir dari diselenggarakannya kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Kegiatan ketertiban umum yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, mempererat tali silaturahmi antar warga, serta sebagai pembinaan moral dan membangun disiplin warga.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Juli 2020 dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar.SH, beliau mengatakan bahwa sulit untuk bisa melaksanakan kegiatan ketertiban umum ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut serta menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan dan membayar iuran ketertiban umum, sedangkan Kelurahan Pahlawan sendiri telah menyediakan pos keamanan dan sarana kebutuhan untuk berjaga malam juga telah di sediakan, dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat ini pos keamanan yang telah di sediakan menjadi terabaikan dan tidak sesuai dengan fungsi

awalnya. Hanya ada 3 pos keamanan yang sampai saat ini aktif berjalan sebagaimana fungsinya yaitu di lingkungan 8, lingkungan 9, dan lingkungan 13 dilengkapi dengan 5 tenaga keamanan yang berjaga bergantian setiap malamnya.

Menurut Anthony dan Govindrajan (2000 : 59) Keselarasan capaian atau tujuan atau *Goal Congruence* adalah tujuan utama dari sebuah organisasi dikarenakan masing – masing individu tentunya memiliki tujuan pribadi sendiri yang berbeda dari tujuan organisasinya. Peran sebuah sistem pengendali lah yang menjembatani antara tujuan individu dan organisasi tersebut. Adanya keselarasan tujuan akan membuat semua bagian dalam organisasi bergerak bersama menuju arah yang sama. Dengan kata lain ketika tujuan organisasi tercapai, tujuan setiap individu dalam organisasi pun seharusnya terpenuhi bukannya terabaikan.

4.3.3 Adanya komunikasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum

Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Dalam sebuah organisasi didalamnya terdiri atas orang-orang (organ) yang memiliki tugas masing-masing serta saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem tentu memerlukan komunikasi yang baik agar kinerja organisasi berjalan dengan baik pula. Sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai.

Dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi yang terjadi antara pihak kelurahan dalam kerjasama yang melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan merupakan komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjalin dari atas ke bawah dan komunikasi atau interaksi ini terjadi secara timbal balik. Interaksi atau komunikasi yang terjalin antara pihak kelurahan dengan masyarakat belum efektif dikarenakan dalam kerjasama yang dilakukan kelurahan masih banyak masyarakat yang tidak ingin turut serta dengan membayar biaya keamanan sebesar Rp.25.000/KK bagi rumah tinggal tanpa usaha tambahan dan Rp.50.000 – Rp.100.000/KK bagi rumah dengan usaha tambahan jual beli besi. Dari 1.855 KK di Kelurahan Pahlawan hanya 422 KK atau sekitar 5,52% KK yang ikut turut serta dalam kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan. Dalam melakukan kerjasama pihak kelurahan melibatkan masyarakat Kelurahan Pahlawan yang dijembatani oleh kepala lingkungan yang bertugas menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai tujuan kegiatan ketertiban umum yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Juli 2020 dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar.SH, beliau mengatakan komunikasi yang terjalin antara kelurahan dengan perangkat kelurahan telah berjalan dengan baik namun untuk komunikasi dengan masyarakat belum berjalan baik terlihat dari kegiatan ketertiban umum yang dilakukan kelurahan tidak dapat dukungan penuh dari masyarakat kelurahan pahlawan, masyarakat keberatan dengan pemungutan bulanan yang dibebankan karena masyarakat berpikir tidak membutuhkan adanya yang berjaga

malam sebab masyarakat bisa menjaga kediamannya sendiri. Sehingga yang seharusnya Kelurahan Pahlawan idealnya memiliki 10 pos keamanan hanya dapat mendirikan 3 pos keamanan yaitu di lingkungan 8, lingkungan 9, dan lingkungan 13 yang dilengkapi 5 orang petugas yang berjaga setiap malamnya.

Menurut Wiryanto (2005) komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok baik itu formal maupun informal sari suatu organisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Faules dkk (2001), mereka berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi diantara orang – orang dalam organisasi dan juga bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi.

Menurut Mulyana Deddy (2004 : 31-32) Komunikasi organisasi berfungsi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit – unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu, suatu organisasi terdiri dari unit – unit komunikasi dalam hubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan organisasi. Dalam organisasi informasi dibutuhkan untuk mengatasi konflik yang terjadi didalam organisasi.

4.3.4 Saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak yang turut serta dalam kegiatan ketertiban umum

Wewenang (*Authority*) merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Tanpa wewenang orang-orang (organ) dalam organisasi. Wewenang bersifat formal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Di dalam fungsi pengorganisasian, seorang atasan berdasarkan posisinya mempunyai hak ataupun wewenang untuk menjalankan atau memberikan perintah kepada bawahannya untuk menjalankan wewenangnya. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Dapat penulis simpulkan bahwa Wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam suatu organisasi. Dari hasil yang penulis dapatkan di lapangan ditemui bahwa lurah sebagai pemegang wewenang tertinggi di Kelurahan Pahlawan sudah cukup baik dalam menggunakan haknya untuk memerintah organ organisasi yang terdapat di kelurahan, dilihat dari keterlibatan lurah dalam kegiatan ketertiban umum di kelurahan belum

maksimal sebagai penyelenggara kegiatan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam melakukan kerjasama lurah memegang kekuasaan sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum, lurah turut ikut serta dalam kerjasama tentang kegiatan ketertiban umum untuk memutuskan dan mengawasi setiap proses rapat serta musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Juli 2020 dengan Bapak Tongku Panusunan Siregar.SH, beliau mengatakan, dalam setiap rapat yang dilaksanakan guna merencanakan kegiatan yang akan dilakukan kelurahan setiap perangkat kelurahan saling menghormati apa yang menjadi tugas dari masing – masing perangkat kelurahan maka dari itu dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum ini perangkat kelurahan yang bukan terkait mengenai kegiatan ini hanya memberikan saran apabila dibutuhkan. Lurah sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di kelurahan bertugas memberikan pembagian tugas serta pengawas terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan kelurahan.

Dalam kegiatan ketertiban umum sangat dibutuhkan informasi dan kerja sama dari setiap kepala lingkungan untuk dapat mengetahui lingkungan yang harus menjadi titik fokus untuk kegiatan ini. Dikarenakan lurah tidak dapat terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung lingkungan mana yang akan menjadi fokus kegiatan ketertiban umum.

Menurut Sugandha (1991 : 8) sikap hormat atau patuh terhadap seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam suatu organisasi merupakan prinsip koordinasi, koordinasi sendiri adalah proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa koordinasi di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan belum seluruhnya efektif. Terbukti dari sasaran dan tujuan terbentuknya pos keamanan yang idealnya 10 pos keamanan hanya 3 pos keamanan yang terbentuk di Kelurahan Pahlawan. Koordinasi belum dapat berjalan efektif disebabkan oleh kerjasama yang dilakukan kelurahan belum melibatkan masyarakat sepenuhnya. Pihak kelurahan telah melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum yang berjumlah 1 orang dan seluruh kepala lingkungan sebanyak 10 orang dari 15 lingkungan kelurahan untuk mencapai ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan.

Dalam proses kerjasama yang dilakukan, Kelurahan Pahlawan mengedepankan aspirasi masyarakat sehingga semua pihak yang ikut serta dalam kerjasama bisa mencapai hasil akhir dari diselenggarakannya kegiatan ketertiban umum. Namun hal tersebut belum bisa di wujudkan secara nyata di Kelurahan Pahlawan dikarenakan masih terdapat masyarakat yang enggan untuk turut ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum.

Sedangkan dalam komunikasi yang terjadi antara pihak kelurahan dalam kerjasama yang melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum serta kepala lingkungan merupakan komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjalin dari atas ke bawah dan komunikasi atau interaksi ini terjadi secara timbal balik. Adapun

interaksi atau komunikasi yang terjalin antara pihak kelurahan dengan masyarakat belum efektif dikarenakan dalam kerjasama yang dilakukan kelurahan masih banyak masyarakat yang tidak ingin turut serta dengan membayar biaya keamanan. Dalam melakukan kerjasama pihak kelurahan melibatkan masyarakat Kelurahan Pahlawan yang dijemput oleh kepala lingkungan yang bertugas menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai tujuan kegiatan ketertiban umum yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan

Selain itu, wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Lurah sebagai pemegang wewenang tertinggi di Kelurahan Pahlawan sudah cukup baik dalam menggunakan haknya untuk memerintah organ organisasi yang terdapat di kelurahan, dilihat dari keterlibatan lurah dalam kegiatan ketertiban umum di kelurahan belum maksimal sebagai penyelenggara kegiatan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam melakukan kerjasama lurah memegang kekuasaan sebagai penyelenggara ketertiban dan ketentraman umum, lurah turut ikut serta dalam kerjasama tentang kegiatan ketertiban umum untuk memutuskan dan mengawasi setiap proses rapat serta musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang diselenggarakan Kelurahan Pahlawan

Berdasarkan hasil dari setiap kategorisasi yang sudah ada hasil temuannya, maka dapat diketahui bahwa Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan

Ketertiban dan Ketentraman Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari komunikasi serta kerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat Kelurahan Pahlawan belum mampu mengajak semua masyarakat Kelurahan Pahlawan untuk berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum, sudah berjalan baik akan tetapi kerja sama yang dilakukan lurah dengan kepala lingkungan harus ditingkat kembali sebab untuk mencapai tujuan dari kegiatan ketertiban umum ini lurah tidak hanya bekerja sama dengan seksi ketentraman dan ketertiban umum saja.
2. Adanya keselarasan mengenai capaian dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum belum berjalan baik di lihat dari bagaimana kelurahan masih belum kuat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum.

3. Adanya komunikasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum sudah berjalan dengan baik, tetapi lurah harus meningkatkan kembali komunikasi dengan masyarakat untuk berdiskusi bersama mengenai perincian kegiatan yang akan dilakukan kelurahan.
4. Patuh terhadap keputusan – keputusan yang di keluarkan pemimpin yang memegang kekuasaan tertinggi yaitu lurah, perangkat kelurahan yang terkait dalam kegiatan ketertiban umum ini bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang di tetapkan kelurahan. Dalam koordinasi mengenai kegiatan ketertiban umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari bagaimana lurah melakukan rapat dengan setiap perangkat kelurahan namun lurah belum maksimal dalam membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan ketertiban umum.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 1994 . *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anthony Govindarajan. 2000 . *Goal Congruence*. Hlm 59 .
- Dydiet Hardjito. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 55.
- Gibson. 2000 . *SDM dan System Pola Kerja*. edisi ke 2. Bandung: RefikaAditama.
- Gie, The Liang . 2000 . *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irham, Fahmi. 2011. *Management Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung :Alfabeta.
- Marry. Parker.Follet . 1997 . *Definision of Management*
- Moleong, Lexy, J .2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik*. Bandung : Yayasan Nuansa Cendikia.

Dokumen resmi:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan. 2018. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang Kelurahan Tahun. 2005.

Peraturan Walikota Nomor 53 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi. 2018. Kota Medan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah. 2014.
Jakarta. PT. Armas Duta Jaya.

*Acc Draft
wamen
11/07-2020*

DRAFT WAWANCARA

EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Nama :

Jabatan :

Umur :

Alamat :

A. Adanya kerja sama antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum.

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana lurah melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana lurah menciptakan kesatuan tindakan dengan pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana lurah menciptakan kesepakatan antara pihak terkait mengenai kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan?

B. Adanya keselarasan mengenai capaian dari kegiatan pelaksanaan ketertiban umum

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi hambatan lurah dalam melaksanakan kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan ?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana lurah mengarahkan pelaksanaan kegiatan ketertiban umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan ?
- 3) Menurut Bapak/ Ibu, apakah kegiatan ketertiban umum telah berjalan efektif di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan?

C. Adanya komunikasi antara lurah dan seksi ketentraman dan ketertiban umum mengenai kegiatan ketertiban umum.



Sigat Cerdas & Terpercaya
 menawarkan kualitas terbaik di setiap diseminasi
 dan pengabdian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Slk-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 17 Februari 2020.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Nabila Riya Pr. Bangun
 NPM : 160100015
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,96

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	Efektivitas koordinasi kelurahan dalam meningkatkan kinerja Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan di kelurahan pahlawan kecamatan Medan Perjuangan.	(LPMK)	CA
2	koordinasi pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kinerja kepala lingkungan di bidang ketertiban dan ketentraman umum di kelurahan pahlawan		
3	Gaya kepemimpinan lurah dalam meningkatkan kinerja aparatur kelurahan di kelurahan pahlawan kecamatan Medan Perjuangan.		

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, 17 Februari 2020.

Ketua

Pemohon,

(... Nabila Riya ...)

Pembimbing / Nabilis Khairi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.065/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 17 Februari 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **NABILA ALYA Br. BANGUN**
N P M : 1603100015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH., S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 17 Februari 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 30 Syawal 1441 H
22 Juni 2020 M


Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab coba lagi diberikan nomor dan tanggal

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 414/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 Dzulqaidah 1441 H
14 Juli 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **NABILA ALYA Br. BANGUN**
N P M : 1603100015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
KELURAHAN PAHLAWAN**

Alamat Kantor : Jalan Kesatria No.53 Medan 2033 No. Telp.(061-456912)

Medan, 15 juli 2020

Nomor : 070/47

Sifat : -,-

Lampiran : -,-

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-

MEDAN

1. Sehubungan dengan surat rekomendasi pengambilan data dari BALITBANG no: 070/764/halitbang/2020 pada tanggal 16 Juli 2020 Perihal: mohon diberikan izin penelitian mahasiswa.
2. Berkenan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa penelitian di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Telah dilaksanakan oleh:
 - Nama : Nabila Alya Br. Bangun
 - Npm :1603100015
 - Prodi : Ilmu Administrasi Publik
 - Lokasi : Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan
 - Judul : Efektifitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

**KELURAHAN PAHLAWAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

**FONGKU PANJUNAN SIREGAR, S.H.
PENATA
NIP. 19820215-200312 1 001**



Unggul, Cerdas dan Terprestasi

Siapa menjawab surat ini agar diutamakan minor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 7 Agustus 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : NABILA ALYA BR. BANGUN
N P M : 1603100015
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (PEMBANGUNAN)

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.065/SK/II.3/UMSU-03/F/2020.. tanggal ..dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN
PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

Pemohon,

(.....)
NAUL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.

(.....)
NABILA ALYA BR. BANGUN

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 272/KEP/II.3-AU/UMSU-03/IF/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Nailif Khairiah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	NOMI VANESSA	1603100089	NAIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK BURUH DI KOTA MEDAN
17	ROBO WINDU ANJANI	1603100074	NAIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH SYARIAH ISLAM DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAN ADAT DAN ISTADAT DI ACEH TAMIANG
18	MILA PUSPITA SARI	1603100013	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MEMOTIVASI PENGELOLA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
19	NABILA ALYA BR. BANGUN	1603100015	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NAIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
20	ANDRIANI BR. SITOMPUL	1603100035	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENETAPAN TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KOTA BINJAI

Medan, U/ SYA dan 1441 H

01 April 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Siwa marjawan sura ni apar diebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : NABILA ALYA BR. BANGUN
N P M : 1603100015
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN PAHLAWAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	25/04/2020	Perbaikan draft wawancara 1	
2.	11/05/2020	Perbaikan draft wawancara 2	
3.	15/06/2020	Perbaikan draft wawancara 3	
4.	08/08/2020	Perbaikan deskripsi dan hasil wawancara	
5.	12/08/2020	Perbaikan tanda baca	
6.	24/08/2020	Perbaikan penulisan kata	
7.	07/09/2020	Perbaikan Kesimpulan	
8.	08/09/2020	Acc Skripsi	

Medan, 08...September...2020..

Dekan,

(Dr. ARIFIN...ALEY, S.Sos, M.S.P)

Ketua Program Studi,

(NAIL...KHARIRAH, S.IP, M.Pd)

Pembimbing ke :

(NAIL...KHARIRAH, S.IP, M.Pd)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1713/KET/IL3-AU/UMSU-P/M/2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Nabila Alya
NPM : 1603100015
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Safar 1442 H.
01 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



CURRICULUM VITAE

PROFIL

Nama : Nabila Aiya Br Bangun
 TempatTanggallahir : Medan, 22 Februari 1999
 Agama : Islam
 JenisKelamin : Perempuan
 Alamat : JalanTanggungBongkar X No. 16
 Status : BelumMenikah

CONTACT



0856-0859-0751



Alyanabila165@gmail.com



nabillalya

PENGALAMAN PELATIHAN

OutbondManajemen Training
tahun 2017

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah/ Universitas	Kota	Tahun	Jurusan
SD	SD Negeri060908	Medan	2004-2010	
SMP	SMP Islam Azizi	Medan	2010-2013	
SMA	SMA Negeri 8	Medan	2013-2016	IPS
SARJANA	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Medan	2016-sekarang	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BASIC SKILL

MS OFFICE



MS POWER POINT





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 625/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2020

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	NURHAKIKI	1603100031	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR DALAM RANGKA PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH T. MEDAN
12	ASMA HUSNA	1603100045	IDA MARTINELLY, SH., MM	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERURUTAN ELEKTRONIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA
13	MILA PUSPTA SARI	1603100013	NALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	Drg. BANGUN NAPITUPULU, M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM PENGELOLA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
14	NABILA ALYA BR. BANGUN	1603100015	IDA MARTINELLY, SH., MM	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	EFEKTIVITAS KOORDINASI KELURAHAN DALAM PERKOTAAN (P89-P2) DALAM RANGKA PENINGKATAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
15	DILLA NAZAR SIREGAR	1603100094	NALIL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	Drg. BANGUN NAPITUPULU, M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUN PERKOTAAN (P89-P2) DALAM RANGKA PENINGKATAN KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERANG

Kotulis Sidang :

Ditetapkan oleh :


 a.n. Rektor
 Wakil Rektor I

 DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Ketpr,

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 26 Shafar 1442 H

14 Oktober 2020 M

Panitia Ujian



Sekretaris

DR. ZULFAHMI, M.Ikom